

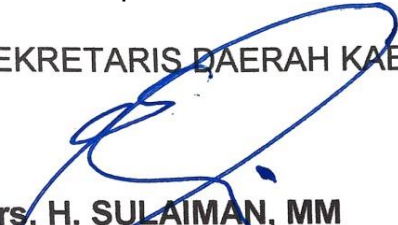
KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, maka bersama ini di sampaikan Rencana AkhirKerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Rencana Akhir Kerja ini merupakan pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Belopa, Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU


Drs. H. SULAIMAN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19651129 198603 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA AKHIR KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
4.1 RENCANA AKHIR KERJA.....	54
4.2 PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB V PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Kinerja ahun Anggaran 2022	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu	34
Tabel 2.4	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu	40
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah kabupaten Luwu Tahun 2024		55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Akhir Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini memuat Rancangan prioritas program dan kegiatan, pencapaian rencana kerja, serta Pendanaan Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.

Rencana Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Disamping itu, Rencana Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) di bidang Pemerintahan Umum, yang dapat terukur dan dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Akhir Perangkat Daerah antara Lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, Lembaran Republik Indonesia tahun 1959 no. 74 Tambahan Lembaran Negara no. 18

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4421)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1114).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1447)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kas Umum Tahun 2011 No. 06)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah kabupaten Luwu Tahun 2016 No. 111)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Daerah (Lembar Daerah Kab. Luwu Tahun 2019 No. 1)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 No. 4)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu 2019-2024;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 139 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.
20. Keputusan Mentri No. 050-5859 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Akhirini adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan

kegiatan Sekretariat Daerah yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Tujuan dari Penyusunan Rencana Akhir Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RenstraSekertariatDaerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.
2. Untuk menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2024;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu tahun sebelumnya dan tahun berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana AkhirKerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu disusun kedalam sebuah dokumen deskriptif yang memuat data kualitatif dan kuantitatif,yangterdiri dari 5 Babyangmeliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Akhir Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Akhir Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Akhir Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Akhir K/L, dan Rencana AkhirProvinsi/Kabupaten/kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Akhir Perangkat Daerah
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Akhir Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023 mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

1. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
5. Formulasi Isu-Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Akhir Kerja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD
- c. program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024 di Tahun 2022, mengingat Rencana Awal tahun 2024 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Renstra periode Tahun 2019-2024, sehingga yang dievaluasi dalam Rencana Akhir Tahun Anggaran 2024 ini adalah Hasil Pelaksanaan Renja 2022 serta Capaian terhadap Renstra periode 2019-2024. Secara umum Sekretariat Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi Rencana Akhir Kerja, Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah dilakukan melalui Pengukuran kinerja kegiatan dan program yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemrintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Rentsra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(2022)	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	01			Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Ururan Pemerintah Daerah	%	26,588,247,004	32,955,951,838	23,668,168,275	26,216,877,409		26,395,927,624	109,288,257,035	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	%	429,527,600	424,517,670	357,263,300	420,750,849		351,888,200	1,197,156,719	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	250,967,680	285,807,780	168,890,000	225,479,879	100%	217,398,250	728,685,909	100%
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	24,060,750	13,854,000	26,921,350	15,578,950	100%	14,060,750	43,493,700	100%

4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	36,764,500	7,095,490	20,642,350	19,828,450	100%	12,844,300	39,768,240	100%
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	41,718,450	22,693,000	45,995,400	63,748,890	100%	41,718,450	128,160,340	100%
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	28,478,500	27,025,900	40,318,350	45,701,380	100%	28,476,500	101,203,780	100%
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	24,723,070	19,020,800	20,257,300	18,744,300	100%	14,573,300	52,338,400	100%
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Dokumen	22,816,650	49,020,700	34,238,550	31,669,000	100%	22,816,650	103,506,350	100%
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	%	9,687,209,970	12,042,473,050	8,574,275,947	8,644,038,746		9,706,910,940	30,393,422,736	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan	OB	8,544,817,000	10,875,954,837	7,386,854,327	7,437,532,054	100%	8,544,817,000	26,858,303,891	100%
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	Dokumen	1,059,870,470	1,069,269,113	1,059,870,470	1,088,152,342	100%	1,080,020,240	3,237,441,695	100%
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	10,000,000	23,624,550	20,533,850	26,070,500	100%	9,551,200	59,246,250	100%

4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	11,922,850	8,828,700	20,179,450	24,257,500	100%	11,922,850	45,009,050	100%
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Dokumen	22,348,400	7,055,350	33,252,650	30,509,850	100%	22,348,400	59,913,600	100%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Laporan	22,488,500	6,784,000	24,945,350	12,974,510	100%	22,488,500	42,247,010	100%
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan	15,762,750	50,956,500	28,639,850	24,541,990	100%	15,762,750	91,261,240	100%
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	%	168,738,750	93,164,852	139,687,200	135,129,960		168,478,750	396,773,562	
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Laporan	109,244,050	67,152,902	105,102,050	115,426,600	100%	109,244,050	291,823,552	100%
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Baranag Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun	Laporan	9,000,000	10,200,000	10,255,000	4,973,550	100%	8,740,000	23,913,550	100%
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Branfg Milik Daerah	Laporan	50,494,700	15,811,950	24,330,150	14,729,810	100%	50,494,700	81,036,460	100%

4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja	%	259,170,000	35,875,000	23,100,000	23,100,000		159,170,000	218,145,000	
4	01	01	2.05	02	Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	159,170,000	13,750,000	23100000	23,100,000	100%	159,170,000	196,020,000	100%
4	01	01	2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Normal	Orang	50,000,000	22,125,000	0	-	100%	-	22,125,000	100%
4	01	01	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	50,000,000	-	0	-	100%	-	-	100%
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	2,584,926,975	1,982,626,631	1,736,655,535	2,104,230,738		2,845,985,325	6,932,842,694	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	32,341,400	79,904,000	45,528,000	21,503,000	100%	32,341,400	133,748,400	100%
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	60,000,000	29,900,000	54,500,000	54,230,000	100%	16,000,000	100,130,000	100%
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	Jenis	13,775,000	5,364,000	19,452,000	18,270,000	100%	13,775,000	37,409,000	100%
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	237,037,475	242,894,275	259,455,985	231,235,240	100%	237,037,475	711,166,990	100%

4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis	48,900,000	89,902,100	48,900,000	71,976,000	100%	48,900,000	210,778,100	100%
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Jenis	180,000,000	178,620,000	180,000,000	183,840,000	100%	180,000,000	542,460,000	100%
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	Jenis	1,162,500,000	424,131,394	499,988,950	629,350,000	100%	1,162,500,000	2,215,981,394	100%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	591,558,650	907,563,562	596,158,650	868,036,898	100%	896,617,000	2,672,217,460	100%
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%	258,814,450	24,347,300	32,671,950	25,789,600	100%	258,814,450	308,951,350	100%
4	01	01	2.07		Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	%	760,030,110	1,035,983,000	282,780,565	858,963,630		72,030,110	1966976740	
4	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	650,000,000	73,700,000	0	0	100%	-	73,700,000	100%
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur yang diadakan	Set	70,000,000	187,220,000	133750000	322,637,555	100%	28,500,000	538,357,555	100%
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Buah/set	28,500,000	196,570,000	11530105	210,855,570	100%	43,530,110	450,955,680	100%

					Lainnya										
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Paket	11,530,110	578,493,000	137500460	325,470,505	100%	-	903,963,505	100%
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	%	6,478,977,800	8,099,965,018	6,688,057,300	7,311,561,284		6,699,591,150	21,646,767,452	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diregistrasi	surat	-	290,450,000	206,400,000	173,900,000	100%			100%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	Bulan	1,937,520,000	1,896,449,518	1,464,480,000	1,482,310,556	100%	1,937,520,000	5,316,280,074	100%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Operasional Peralatan dan Perlengkapan Kanrtor yang disediakan	OB	541,457,800	649,239,500	470,365,600	608,937,500	100%	541,457,800	1,799,634,800	100%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	OB	4,000,000,000	5,263,826,000	4,546,811,700	5,046,413,228	100%	4,220,613,350	14,530,852,578	100%
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dipelihara/direhab	%	1,173,755,650	3,662,415,445	837,540,224	1,635,517,197		1,123,009,650	6,420,942,292	

4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	83,720,000	130,917,216	175,671,300	204,836,935	100%	83,720,000	419,474,151	100%
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	1,016,785,650	595,097,329	243,973,390	473,993,262	100%	1,016,785,650	2,085,876,241	100%
4	01	01	2.09		Pemeliharaan/Ra rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	M2	50,000,000	2,913,910,900	388,755,502	937,537,000	100%	14,250,000	3,865,697,900	100%
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	14,250,000	22,490,000	19,506,029	19,150,000	100%	8,254,000	49,894,000	100%
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9,000,000	-	9,634,003	-	100%	-	-	0%
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	%	1,491,773,377	1,431,016,168	1,523,083,244	1,287,282,298		1,491,773,377	4,210,071,843	

						Daerah										
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah	Bulan	671,623,377	567,166,168	702,933,244	468,732,298	100%	671,623,377	1,707,521,843	100%	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	150,150,000	193,850,000	150,150,000	148,550,000	100%	150,150,000	492,550,000	100%	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check Up/ Pelayanan Kesehatan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	100%	220,000,000	660,000,000	100%	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional yang dibutuhkan	Bulan	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	100%	450,000,000	1,350,000,000	100%	
4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	%	2,689,273,092	3,298,902,800	2,737,249,190	2,705,795,000		2,689,273,092	8,693,970,892		
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	1,331,316,000	1,795,260,800	1,372,540,586	1,362,294,000	100%	1,331,316,000	4,488,870,800	100%	

4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wajkil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	1,008,922,976	1,145,091,000	1,020,038,241	1,004,233,000	100%	1,008,922,976	3,158,246,976	100%
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	349,034,116	358,551,000	344,670,363	339,268,000	100%	349,034,116	1,046,853,116	100%
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi	%	462,261,630	481,358,604	411,036,020	479,044,609		461,294,780	1,421,697,993	5
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PD	103,445,700	87,010,100	92,384,900	161,471,625	100%	103,445,700	351,927,425	100%
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	107,208,000	155,820,200	125,128,010	124,868,380	100%	107,208,000	387,896,580	100%
4	01	01	2.13	03	Penigkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan	63,831,930	115,723,100	69,407,430	69,215,124	100%	63,831,930	248,770,154	100%
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang di monitoring	Laporan	10,000,000	39,233,300	17,417,730	17,395,500	100%	9,033,150	65,661,950	100%
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	177,776,000	83,571,904	106,697,950	106,093,980	100%	177,776,000	367,441,884	100%

4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	402,602,050	367,653,600	357,439,750	611,463,098		626,522,250	1,605,638,948	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokoleran yang difasilitasi	Kegiatan	136,035,000	186,300,000	136,035,000	136,450,000	100%	166,920,000	489,670,000	100%
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dialog/Audiensi/Koordinasi Pimpinan yang di Fasilitasi	kali	200,000,000	159,595,100	184,633,500	439,037,898	100%	343,035,200	941,668,198	100%
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang di dokumentasikan	kali	66,567,050	21,758,500	36,771,250	35,975,200	100%	116,567,050	174,300,750	100%
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		3,551,780,920	3,143,894,967	4,410,572,900	5,396,249,395	-	3,551,780,720	12,091,925,082	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	%	391,928,650	452,323,935	432,870,000	405,422,503		391,928,650	1,249,675,088	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	169,867,500	195,889,645	151,058,450	151,482,690	100%	169,867,500	517,239,835	100%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	110,271,000	155,640,528	154,053,060	131,882,721	100%	110,271,000	397,794,249	100%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	111,790,150	100,793,762	127,758,490	122,057,092	100%	111,790,150	334,641,004	100%
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	2,313,991,430	1,852,032,420	3,191,496,750	3,683,516,532		2,313,991,430	7,849,540,382	

4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Kegiatan	518,320,130	1,758,882,220	473,930,550	446,242,490	100%	518,320,130	2,723,444,840	100%
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	1,099,231,700	46,404,600	1,388,969,900	1,799,308,992	100%	1,099,231,700	2,944,945,292	100%
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	696,439,600	46,745,600	1,328,596,300	1,437,965,050	100%	696,439,600	2,181,150,250	100%
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan		796,345,940	817,524,962	721,462,270	878,772,281		796,345,940	2,492,643,183	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi dan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	Produk Hukum	411,649,820	374,839,812	309,232,300	448,650,381	100%	411,649,820	1,235,140,013	100%
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kali	223,318,210	282,223,900	236,149,850	235,627,030	100%	223,318,210	741,169,140	100%
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sistem Informasi Hukum yang dikelola	Sistem	161,377,910	160,461,250	176,080,120	194,494,870	100%	161,377,910	516,334,030	100%
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama		49,514,900	22,013,650	64,743,880	428,538,079		49,514,700	500,066,429	

4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri yang difasilitasi	MoU	28,066,450	13,770,800	34,729,590	401,765,489	100%	28,066,450	443,602,739	100%
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	21,448,450	8,242,850	30,014,290	26,772,590	100%	21,448,250	56,463,690	100%
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan		769,603,273	893,573,960	940051090	1,168,727,293		984,677,143	3,046,978,396	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	306,060,343	403,350,141	435,517,260	680,869,928		328,814,633	1,413,034,702	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD	Laporan	22,754,290	0	-	0	100%	22,754,290	22,754,290	100%
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	154,557,623	75,508,841	177,703,300	458,434,668	100%	154,557,623	688,501,132	100%
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasam Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	78,997,500	163,923,830	99,458,550	81,061,550	100%	78,997,500	323,982,880	100%
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan	Laporan	-	-	22,754,430	9,319,950	100%	-	9,319,950	100%

						BUMD dan BLUD										
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan	72,505,220	163,917,470	135,600,980	132,053,760	100%	72,505,220	368,476,450	100%	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan data/informasi bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	%	74,405,200	67,755,400	77,509,250	67,047,950		74,405,200	209,208,550		
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	74,405,200	67,755,400	77,509,250	67,047,950	100%	74,405,200	209,208,550	100%	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	%	379,137,730	375,974,349	379,237,730	384,733,365		533,672,360	1,294,380,074		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	139,160,810	153,035,065	139,160,810	178,237,532	100%	234,127,460	565,400,057	100%	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	146,590,000	136,924,950	146,690,000	139,088,855	100%	195,101,800	471,115,605	100%	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	93,386,920	86,014,334	93,386,920	67,406,978	100%	104,443,100	257,864,412	100%	

4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan data/informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi pimpinan	%	10,000,000	46,494,070	47,786,850	36,076,050		47,784,950	130,355,070	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Laporan	10,000,000	46,494,070	47,786,850	36,076,050	100%	47,784,950	130,355,070	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang cukup memadai, juga didukung dengan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi, sehingga memungkinkan pencapaian kinerja yang memuaskan.

Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Luwu

No.	Indikator Program dan Kegiatan Masuk Dalam IKU Kab. Luwu	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	11		13			13
1	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun		IKU	100 %	100 %	100 %	95%	97 %	99%	56 %	56 %	65 %	
2	Persentase Perangkat Daerah yang di Evaluasi		IKU	100 %	100 %	100 %	95%	85 %	85 %	50 %	50 %	60 %	
3	Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah yang di Fasilitasi		IKU	100 %	100 %	100 %	90%	100 %	95%	50 %	50 %	60 %	
4	Persentase Pelayanan Kedinasan yang di Fasilitasi		IKK	100 %	100 %	100 %	95%	90 %	90%	50 %	50 %	55 %	
5	Persentase Nilai LPPD Kabupaten		IKK	100 %	100 %	100 %	100%	85%	90%	50 %	50 %	55 %	
6	Persentase Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknis sesuai Tingkat Kebutuhannya.		IKK	100%	100 %	100 %	100%	85%	90%	50 %	50 %	65 %	
7	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan		IKK	100%	100 %	100 %	100%	85%	85%	50 %	50 %	55 %	
8	Persentase Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada Kepala Daerah		IKK	100 %	100 %	100 %	100%	90 %	90%	50 %	50 %	55 %	
9	Persentase UMKM yang memperoleh Akses ke Lembaga Keuangan		IKK	100 %	100 %	100%	100%	95 %	90%	50 %	50 %	55 %	

No.	Indikator Program dan Kegiatan Masuk Dalam IKU Kab. Luwu	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	11		13			13
10	Persentase Potensi SDA yang telah dimanfaatkan		IKK	100 %	100 %	100 %	95%	95 %	95 %	95 %	50 %	55 %	
11	Persentase Paket Tender yang diselesaikan Tepat Waktu		IKK	100%	100 %	100 %	100%	80%	85%	90%	50 %	55 %	
12	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender		IKK	100%	100 %	100 %	100%	80%	85%	90%	50 %	55 %	
13	Persentase Besaran Efisiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu.		IKK	100 %	100 %	100%	98%	95 %	95 %	95 %	50 %	55 %	
14	Persentase Aset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi		IKK	100 %	100 %	100%	100%	95 %	95 %	95 %	50 %	55 %	
15	Persentase Produk Hukum Daerah yang di Fasilitasi Kurun Waktu yang Sama		IKK	100 %	100 %	100%	90%	95 %	95 %	95 %	50 %	55 %	
16	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN		IKK	100 %	100 %	100%	95%	95 %	95 %	95 %	50 %	55 %	
17	Persentase Ketersediaan Analisis Jabatan		IKK	100 %	100 %	100%	100%	95 %	95 %	95 %	50 %	55 %	
18	Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Setda yang di Verifikasi		IKK	100 %	100 %	100%	100%	100 %	95 %	95 %	50 %	55 %	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu masih terdapat berbagai permasalahan yang sampai saat ini masih membutuhkan pembenahan untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal, adapun permasalahan pada Sekretariat Daerah pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi di Sekretariat Daerah
2. Penguasaan terhadap Tupoksi beberapa aparat masih lemah sehingga hasil koordinasi tidak maksimal
3. Belum tertatanya sistem kerja yang terpadu, efektif dan efisien pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah
4. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pada setiap Bagian di Sekretariat Daerah ;
5. Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah

Selain permasalahan tersebut di atas juga ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti :

1. Regulasi yang sering berubah-ubah
2. Disiplin Pegawai masih kurang

permasalahan dan hambatan yang terdapat Sekretariat Daerah tentu saja akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepada Daerah jika tidak segera dibenahi, adapun visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2019-2024, serta hubungannya dengan kinerja Sekretariat Daerah dapat terlihat pada uraian berikut:

Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih yang juga ditetapkan sebagai visi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu :

**Kabupaten Luwu Maju, Sejahtera dan Mandiri
dalam Nuansa Religi**

Dalam rumusan visi ini ada empat pokok visi yakni maju, Sejahtera, Mandiri dan Religi. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Maju, mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan penganggaran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

Mandiri, mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan

kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

Religi, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengalaman agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) misi pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religious.
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.
9. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi public yang dinamis dan kondusif.
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Berdasarkan pada misi Bupati dan Wakil Bupati diatas, maka Sekertariat Daerah akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan misi pertama yaitu ***mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.***

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD, semua program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD semuanya diakomodir ke dalam Renja, namun mengingat keterbatasan anggaran kemungkinan terdapat program dan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta kemungkinan terdapat besaran rupiah yang berbeda dari Renja ke RKA, adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	26,588,247,004	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	26,588,247,004	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100%	429,527,600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100%	429,527,600	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	100%	9,687,209,970	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu	100%	9,687,209,970	

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	168,738,750	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	168,738,750	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja	100%	259,170,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja	100%	259,170,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	2,584,926,975	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	2,584,926,975	
6	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	760,030,110	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	760,030,110	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100%	6,478,977,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100%	6,478,977,800	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Persentase BMD yang dipelihara/direhab	100%	1,173,755,650	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Persentase BMD yang dipelihara/direhab	100%	1,173,755,650	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1,491,773,377	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1,491,773,377	

10	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	100%	2,689,273,092	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Luwu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	100%	2,689,273,092	
11	Penataan Organisasi	Kab. Luwu	Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	462,261,630	Penataan Organisasi	Kab. Luwu	Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	462,261,630	
12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	402,602,050	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	402,602,050	
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Luwu	Cakupan Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	3,551,780,920	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Luwu	Cakupan Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	3,551,780,920	
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	391,928,650	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	391,928,650	
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	2,313,991,430	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	2,313,991,430	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan	100%	796,345,940	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan	100%	796,345,940	

4	Fasilitasi Kerja Sama	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama	100%	49,514,900	Fasilitasi Kerja Sama	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama	100%	49,514,900	
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Luwu	Cakupan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	769,603,273	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Luwu	Cakupan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	769,603,273	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	306,060,343	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	306,060,343	
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Luwu	Persentase ketersediaan data/informasi bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	74,405,200	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Luwu	Persentase ketersediaan data/informasi bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	74,405,200	
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100%	379,137,730	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Luwu	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100%	379,137,730	
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Luwu	Persentase ketersediaan data/informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	10,000,000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Luwu	Persentase ketersediaan data/informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi pimpinan	100%	10,000,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Terkait dengan kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah “Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan bersih”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Akhir Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahunan yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
1	Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Utama Sekretariat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	99,95 %

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah adalah pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Berdasarkan hal tersebut di atas serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka disusunlah 3 Program yang membawahi 20 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan AN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Lainnya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Knator dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Knator atau Bangunan Lainnya

9) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Pakaian Dina dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dn Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

10) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- Penyediaan Kebutuhan Kepala Rumah Tangga Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Keutuhan Rumah Tngga Sekretariat daerah

11) Penataan Organisasi

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan
- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana\
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

12) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Fasilitasi Keprotokoleran
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Penokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1) Administrasi Tata Pemerintahan

- Penataan Administrasi Pemerintahan
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

4) Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
- 2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- 3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa
- 4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Berdasarkan penyebaran lokasi program dan kegiatan, hampir seluruh program dan kegiatan Sekretariat Daerah berlokasi di Pemda Luwu, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan di luar Sekretariat Daerah seperti Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Adapun total Pagu Indikatif di Tahun Anggaran 2023 guna pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar ***Rp 30.932.385.487 (Tiga Puluh Milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)*** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk lebih rinci program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C. 33

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Serta Perkiraan Maju Anggaran 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemrintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024			Catatan Penting	Rencana Awal Tahun Anggaran 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6		6	7
4	01	01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			26,588,247,004			29,669,150,000
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu			429,527,600			530,000,000
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Belopa	100%	250,967,680		100%	300,000,000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Belopa	100%	24,060,750		100%	30,000,000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun	Belopa	100%	36,764,500		100%	25,000,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Belopa	100%	41,718,450		100%	60,000,000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun	Belopa	100%	28,478,500		100%	35,000,000

4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Belopa	100%	24,723,070		100%	25,000,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Belopa	100%	22,816,650		100%	55,000,000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara Tepat Waktu			9,687,209,970			10,859,000,000
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan	Belopa	100%	8,544,817,000		100%	9,544,000,000
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	Belopa	100%	1,059,870,470		100%	1,200,000,000
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Belopa	100%	10,000,000		100%	15,000,000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Belopa	100%	11,922,850		100%	15,000,000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Belopa	100%	22,348,400		100%	30,000,000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Belopa	100%	22,488,500		100%	30,000,000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Belopa	100%	15,762,750		100%	25,000,000
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD			168,738,750			185,000,000

4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Belopa	100%	109,244,050		100%	120,000,000
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Baranag Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun	Belopa	100%	9,000,000		100%	10,000,000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Branfg Milik Daerah	Belopa	100%	50,494,700		100%	55,000,000
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja		100%	259,170,000		100%	320,000,000
4	01	01	2.05	02	Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapannya	Belopa	100%	159,170,000		100%	200,000,000
4	01	01	2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Normal	Belopa	100%	50,000,000		100%	60,000,000
4	01	01	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumalh ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Belopa	100%	50,000,000		100%	60,000,000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran			2,584,926,975			3,010,000,000
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Belopa	100%	32,341,400		100%	40,000,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Belopa	100%	60,000,000		100%	70,000,000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	Belopa	100%	13,775,000		100%	20,000,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Belopa	100%	237,037,475		100%	240,000,000

4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Belopa	100%	48,900,000		100%	50,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Belopa	100%	180,000,000		100%	190,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	Belopa	100%	1,162,500,000		100%	1,200,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belopa	100%	591,558,650		100%	900,000,000
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Belopa	100%	258,814,450		100%	300,000,000
4	01	01	2.07		Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor			760,030,110			420,000,000
4	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belopa	100%	650,000,000		100%	300,000,000
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur yang diadakan	Belopa	100%	70,000,000		100%	70,000,000
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Belopa	100%	28,500,000		100%	30,000,000
4	01	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Belopa	100%	11,530,110		100%	20,000,000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa			6,478,977,800			7,600,000,000

4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diregistrasi	Belopa	100%	-		100%	0
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	Belopa	100%	1,937,520,000		100%	2,000,000,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Operasional Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Belopa	100%	541,457,800		100%	600,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	100%	4,000,000,000		100%	5,000,000,000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dipelihara/direhab			1,173,755,650			1,225,000,000
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Belopa	100%	83,720,000		100%	90,000,000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Belopa	100%	1,016,785,650		100%	1,050,000,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	Belopa	100%	50,000,000		100%	60,000,000
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Belopa	100%	14,250,000		100%	15,000,000

4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Belopa	100%	9,000,000	100%	10,000,000
4	01	01	2.11		Administrasi Keungan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1,491,773,377		1,500,150,000
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belopa	100%	671,623,377	100%	680,000,000
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belopa	100%	150,150,000	100%	150,150,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check Up/ Pelayanan Kesehatan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belopa	100%	220,000,000	100%	220,000,000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional yang dibutuhkan	Belopa	100%	450,000,000	100%	450,000,000
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan			2,689,273,092		2,900,000,000
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Belopa	100%	1,331,316,000	100%	1,400,000,000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Belopa	100%	1,008,922,976	100%	1,100,000,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Belopa	100%	349,034,116	100%	400,000,000

					Daerah							
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi			462,261,630			480,000,000
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Belopa	100%	103,445,700		100%	110,000,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belopa	100%	107,208,000		100%	110,000,000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Belopa	100%	63,831,930		100%	65,000,000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang di monitoring	Belopa	100%	10,000,000		100%	15,000,000
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Belopa	100%	177,776,000		100%	180,000,000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			402,602,050			640,000,000
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokoleran yang difasilitasi	Belopa	100%	136,035,000		100%	170,000,000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dialog/Audiensi/Koordinasi Pimpinan yang di Fasilitasi	Belopa	100%	200,000,000		100%	350,000,000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang di dokumentasikan	Belopa	100%	66,567,050		100%	120,000,000

4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			3,551,780,920			2,580,000,000
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan		100%	391,928,650		100%	410,000,000
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	Belopa	100%	169,867,500		100%	170,000,000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Belopa	100%	110,271,000		100%	120,000,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Belopa	100%	111,790,150		100%	120,000,000
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			2,313,991,430			1,345,000,000
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Belopa	100%	518,320,130		100%	520,000,000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Belopa	100%	1,099,231,700		100%	125,000,000
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belopa	100%	696,439,600		100%	700,000,000
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan			796,345,940			770,000,000
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi dan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	Belopa	100%	411,649,820		100%	420,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum	Belopa	100%	223,318,210		100%	230,000,000

4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sistem Informasi Hukum yang dikelola	Belopa	100%	161,377,910		100%	120,000,000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama			49,514,900			55,000,000
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri yang difasilitasi	Belopa	100%	28,066,450		100%	30,000,000
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Belopa	100%	21,448,450		100%	25,000,000
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan			769,603,273			1,021,000,000
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			306,060,343			345,000,000
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD	Belopa	100%	22,754,290		100%	25,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Belopa	100%	154,557,623		100%	160,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasam Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Belopa	100%	78,997,500		100%	80,000,000
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD	Belopa	100%	-		100%	-
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Belopa	100%	72,505,220		100%	80,000,000
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan data/informasi bidang Pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan			74,405,200			76,000,000

4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Belopa	100%	74,405,200		100%	76,000,000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			379,137,730			560,000,000
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Belopa	100%	139,160,810		100%	240,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Belopa	100%	146,590,000		100%	200,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Belopa	100%	93,386,920		100%	120,000,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan data/informasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan bagi pimpinan			10,000,000			40,000,000
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Belopa	100%	10,000,000		100%	40,000,000

BAB IV

RENCANA AKHIR KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Akhir Kerja

Rencana Akhir Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2024 sebanyak 3 Program, 20 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan, penyusunan Rencana Akhir Kerja Sekretariat Daerah tetap mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Daerah direncanakan sebesar ***Rp 30.932.385.487 (Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)*** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk lebih rinci Program dan Kegiatan dapat dilihat pada table beriku

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
					SEKRETARIAT DAERAH																	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												31,931.379. 144					33,943,680,110
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												31,931.379. 144					33,943,680,110
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												29.251.506. 597					30,342,680,110
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												404.785.962					530,000,000
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Dokumen	100 %	245.326.155	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	300,000,000					

4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	3 Dokumen	100 %	17.615.888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	30,000,000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Dokumen	100 %	13.422.402	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Dokumen	100 %	40.330.618	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	60,000,000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Dokumen	100 %	26.725.306	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35,000,000

4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	1 Lapora n	100 %	14.259.256	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25,000,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Lapora n	100 %	47.106.337	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	55,000,000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,686.351.403				10,859,000,000
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	100 Orang/bulan	100 %	8,544,817,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	9,544,000,000
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	4 Dokumen	100 %	1,065.240.962	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/V	4 Dokume n	1,200,000,000

						pemerintahan daerah	SKPD	daerah yang disusun						Umum		erifikasi Keuangan SKPD		
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	3 Dokum en	100 %	6.966.455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokume n	15,000,000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	3 Lapora n	100 %	9.235.813	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	15,000,000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	3 Dokum en	100 %	22,088.987	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Pemeriksaa n	3 Dokume n	30,000,000

4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	14 Lapora n	100 %	22,239.973	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	30,000,000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	3 Dokum en	100 %	15,762,213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokume n	25,000,000
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								157.501.232				185,000,000
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Lapora n	100 %	105.986.165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	120,000,000

4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	6.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10,000,000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	100 %	45.385.067	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	55,000,000
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								373.400.000				320,000,000
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	90 Paket	100 %	238.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	200,000,000
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Orang	100 %	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	60,000,000

4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	60,000,000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								3.777.432.121				3,010,000,000
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	20 Paket	100 %	32,339.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	40,000,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	17 Paket	100 %	887.606.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	70,000,000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Paket	100 %	9.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20,000,000

4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	24 Paket	100 %	237.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	240,000,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	3 Paket	100 %	71.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	3 Dokumen	100 %	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	190,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	3 Laporan	100 %	1,188.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	1,200,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	42 Laporan	100 %	890.013.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	900,000,000

4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	0	jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	0 0	100 %	280.971.771	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 0	300,000,000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.964.172.400				873,530,110
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Unit	100 &	1.173.392.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	700,000,000
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	1 Unit	100 &	159.988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100,000,000
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Unit	100 &	512.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	30,000,000

4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Unit	100 &	118.692.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	43,530,110
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6,870.748.565				7,600,000,000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Lapora n	100 &	1,923.531.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2,000,000,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Lapora n	100 &	747.333.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	600,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Lapora n	100 &	4,199.883.665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5,000,000,000

4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,744.769.0 60					1,225,000,000
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	5 Unit	100 &	203.500.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	90,000,000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	486 Unit	100 &	1,251.685.1 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	486 Unit	1,050,000,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	3 Unit	100 &	157.153.360	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	3 Unit	60,000,000

4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	2 Unit	100 &	123.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15,000,000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	-	2 Unit	100 &	8.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10,000,000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								1,491,223.377				1,500,150,000
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Orang/ Bulan	100 &	671,623,377	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ ulan	680,000,000

4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	5 Paket	100 &	149.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	150,150,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Orang	100 &	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	220,000,000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Orang/ Bulan	100 &	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	450,000,000
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								1.706.699.610				2,900,000,000

4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	5 Paket	100 &	1,357.694.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1,400,000,000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	5 Paket	100 &	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1,100,000,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	5 Paket	100 &	349,005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	400,000,000
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi								451.573.488				480,000,000
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	5 Dokumen	100 %	100.782.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	110,000,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	7 Laporan	100 %	105.489.483	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan	7 Laporan	110,000,000

						pemerintahan daerah								Umum		Publik dan Tata Laksana		
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	5 Dokum en	100 %	62.484.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokume n	65,000,000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	5 Dokum en	100 %	9.990.708	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokume n	15,000,000
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	5 Dokum en	100 %	172.825.835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokume n	180,000,000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								622.849.379					640,000,000
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Lapora n	100 %	163.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokola	2 Laporan	170,000,000

						pemerintahan daerah		Pimpinan						Umum		n		
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Lapora n	100 %	343,025.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	350,000,000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Cakupan penyelenggara an Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	1 Lapora n	100 %	116,564.229	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pendokume ntasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	120,000,000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								1.750.013.027					2,580,000,000
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan								423.658.931					410,000,000
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan penyelenggara an administrasi tata pemerintahan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	2885 Nilai	2 Dokum en	100 %	180.373.531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokume n	170,000,000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Cakupan penyelenggara an administrasi tata pemerintahan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	2885 Nilai	1 Dokum en	100 %	129.321.337	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokume n	120,000,000

4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	2885 Nilai	1 Dokumen	100 %	113.964.063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	120,000,000
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								413.265.863				1,345,000,000
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan pelaksanaan bina mental spritual dan evaluasi kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	2 Dokumen	100 %	272.453.908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	520,000,000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelaksanaan bina mental spritual dan evaluasi kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	1 Dokumen	100 %	122.202.565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	1 Dokumen	125,000,000

							Pengendalian Penduduk dan KB								Administrasi Kependuduk an Dan Pencatatan Sipil, Pemberdaya an Masyarakat dan Desa, Pengendalia n Penduduk dan KB		
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan pelaksanaan bina mental spritual dan evaluasi kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	1 Dokum en	100 %	18.609.390	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahtera an Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaa n dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan , Perpustakaa n, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokume n	700,000,000
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								795.345.115				770,000,000

4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	315 Dokum en	100 %	411,649,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	315 Dokume n	420,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	20 Kasus	100 %	222.317...950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kasus yang Mendapatka n Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	230,000,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Cakupan penyelenggara an Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Perse n	1 Dokum en	100 %	161,377,524	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokument asi	1 Dokume n	120,000,000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								117.743.118					55,000,000
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Cakupan penyelenggara an Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	25 Perse n	2 Dokum en	100 %	90.504.537	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokume n	30,000,000
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Cakupan penyelenggara an Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	25 Perse n	5 Lapora n	100 %	27.238.581	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	25,000,000

4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								929.859.520					1,021,000,000
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								494.859.706					345,000,000
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Cakupan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 jumlah	1 Dokumen	100 %	22,754,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	25,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Cakupan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 jumlah	1 Laporan	100 %	320.604.836	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	160,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Cakupan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 jumlah	1 Dokumen	100 %	78,995.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	80,000,000

4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Cakupan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 jumlah	1 Dokumen	100 %	72,505,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	80,000,000
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								68.912.631				76,000,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase penyelesaian tender Paket Pekerjaan Tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan administrasi pembangunan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	86 Persen	1 Laporan	100 %	68.912.631	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	76,000,000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								316.676.912				560,000,000
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan Sistem SPSE beroperasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	85 Persen	1 Dokumen	100 %	148.630.689	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	240,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase ketersediaan Sistem SPSE beroperasi	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Cakupan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	85 Persen	1 Dokumen	100 %	57.606.583	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	200,000,000

4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan Sistem SPSE beroperasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	85 Persen	3 Orang	100 %	110.439.645	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	120,000,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								49.410.266				40,000,000
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilaksanakan secara maksimal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Cakupan penyelenggaraan pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	4 Dokumen	100 %	49.410.266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	40,000,000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Akhir Kerja (Rankhir) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan hasil perumusan yang disesuaikan dengan kondisi berkembang saat ini serta proyeksi satu tahun mendatang (2025) dengan memperhatikan penerimaan dana dan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga selalu dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

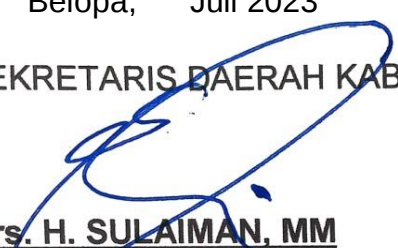
Pencapaian hasil pelaksanaan Rencana Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat memberi kontribusi optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Selain itu dalam pelaksanaan Rencana Akhir ini dibutuhkan peran serta dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat meliputi berbagai hal termasuk pembiayaan.

Demikian Rencana Akhir ini disajikan sebagai gambaran arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu TA.2024. Diharapkan kesungguhan dari semua pihak untuk melaksanakan Rencana Kerja ini dengan sebaik – baiknya sehingga sasaran program akan dapat dicapai.

Belopa, Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU


Drs. H. SULAIMAN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19651129 198603 1 011